

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki banyak cabang dan mitra organisasi salah satunya adalah United Nation World Tourism Organization atau UNWTO yang merupakan istilah yang baru di gunakan pada tahun 2003. Istilah UNWTO belum populer pada tahun pertama pembentukannya. UNWTO lahir pada tahun 1925 pertama kali menggunakan istilah *International Congress of Official Tourist Traffic Association (ICOTT)* dan pada tahun 1934 berubah nama menjadi *International Union of Official Tourist Publicity Organizations (IUOTPO)*. Seiring dengan meningkatnya pariwisata internasional dan setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2 IUOTPO berubah menjadi *International Union of Official Travel Organizations*. IUOTPO memiliki tujuan untuk memajukan pariwisata, serta memanfaatkan pariwisata sebagai strategi pembangunan ekonomi suatu negara terutama negara-negara berkembang dan sebagai komponen perdagangan internasional. Pada tahun 1967 pada sidang umum IUOTPO, memunculkan gagasan untuk membentuk lembaga antar-pemerintah yang juga akan bekerjasama dengan badan-badan internasional PBB lainnya. Dan pada tahun 1976 UNWTO resmi dibentuk sebagai organisasi antar-pemerintah di bawah PBB (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia , 2012).

UNWTO (*United Nation World Tourism Organization*) merupakan organisasi pariwisata dunia dibawah PBB yang memiliki wewenang untuk mempromosikan pariwisata dunia dan bertanggung jawab pada keberlanjutan dan akses pariwisata dunia. Mempromosikan pariwisata dunia dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, inklusifitas dan memperhatikan lingkungan sebagai salah satu bentuk promosi industri pariwisata berkelanjutan. Dengan tujuan untuk mendorong penerapan Kode Etik Global untuk Pariwisata, untuk memaksimalkan kontribusi pariwisata global dalam bidang sosial-ekonomi dengan meminimalisir adanya dampak negatif dan memiliki komitmen untuk mempromosikan industri pariwisata sebagai instrumen dalam mencapai

tujuan pembangunan berkelanjutan yang diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. (UN World Tourism Organization, n.d.).

Awal tahun 1970 konsep Pembangunan Berkelanjutan merupakan konsep yang digunakan untuk sebuah perencanaan lingkungan. Namun, pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan dirasa kurang dipahami dan menimbulkan perdebatan bagaimana cara melindungi kelestarian alam dengan masih memperhatikan keuntungan secara ekonomi (International Institute for Sustainable Development, n.d.). Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan alat untuk menggabungkan antara konservasi lingkungan dan kualitas makhluk hidup dalam bidang sosial-ekonomi (International Institute for Sustainable Development, n.d.). Organisasi-organisasi dunia yang memperhatikan isu lingkungan dan ekonomi termasuk organisasi dunia yang bergerak untuk pariwisata internasional telah banyak menyatakan kesiapannya terhadap industri pariwisata yang hendaknya memiliki prinsip-prinsip berkelanjutan dengan tetap menjaga dan menghargai kelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial dan kearifan lokal dengan masyarakat. Menurut TC (*Tourism Concern*) dan WWF (*Worldwide Fund for Nature*) mendefinisikan konsep pariwisata berkelanjutan adalah sebagai serangkaian industri pariwisata dengan infrastrukturnya yang memperhatikan kapasitas alami untuk pertumbuhan dan produktifitas masa depan tidak hanya mementingkan keuntungan ekonomi tetapi juga mementingkan regenerasi alam, sosial dan budaya (Travel & Tourism ECONOMIC IMPACT 2016 EUROPEAN UNION LCU, 2016).

World Commission on Environment and Development Majelis Umum PBB pada *Earth Summit* ke-4 pada 1992 menyatakan bahwa dunia memiliki kesamaan dalam pembangunan berkelanjutan untuk masa depan. Sejak *Earth Summit* pada 1992, konsep pembangunan berkelanjutan memiliki definisi semakin luas mengarah pada pariwisata berkelanjutan, karena dirasa pariwisata menyumbangkan sebagian besar keuntungannya untuk pembangunan ekonomi suatu negara. Terbentuklah rencana dan kebijakan untuk pariwisata berkelanjutan. UN World Tourism Organization sebagai organisasi pariwisata dunia akan menyertakan konsep pembangunan berkelanjutan pada rencana pembangunan pariwisata. UN World Tourism Organization mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai pariwisata yang kedepannya tidak hanya mampu meningkatkan keuntungan ekonomi tetapi juga memiliki kemampuan untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan

diharapkan untuk menjaga nilai-nilai budaya, kearifan lokal, keanekaragaman hayati maupun non-hayati (Bricker, 2001).

Menurut UN World Tourism Organization, Pariwisata Berkelanjutan adalah Pariwisata yang dapat memperhitungkan keseluruhan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa mendatang, tidak hanya menangani kebutuhan pengunjung dan industri namun, Pariwisata Berkelanjutan harus bisa menangani kebutuhan lingkungan dan masyarakat lokal. Pariwisata Berkelanjutan harus mengoptimalkan sumber daya lingkungan yang merupakan elemen penting dalam pengembangan industri pariwisata, membantu melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati. Memastikan berjalannya operasi ekonomi untuk jangka panjang tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi tetapi juga manfaat sosial kepada semua pemangku kepentingan yang terdistribusi secara adil, termasuk menyediakan kesempatan kerja dan peluang masyarakat dalam memperoleh penghasilan dan berkontribusi untuk pengentasan kemiskinan. Pariwisata Berkelanjutan tidak hanya dalam aspek sosial dan ekonominya tetapi juga aspek budaya dari masyarakat tuan rumah sebuah destinasi pariwisata, melestarikan budaya dan nilai-nilai adat-istiadat dan nilai-nilai tradisional lainnya yang telah dibangun oleh masyarakat serta dapat berkontribusi pada pemahaman toleransi antar budaya dan menghormati kearifan lokal yang ada pada masyarakat. (Travel & Tourism ECONOMIC IMPACT 2016 EUROPEAN UNION LCU, 2016).

Wisatawan zaman sekarang di harapkan tidak hanya sekedar berkunjung ke destinasi wisata untuk menikmati wisata tetapi juga, harus terlibat dalam menjaga lingkungan juga kearifan lokalnya (A Global Sustainable Future , 2001).

Indonesia memiliki daya tarik tersendiri di bidang pariwisata. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kurang lebih 17.500 pulau dan memiliki destinasi-destinasi wisata alam yang mempesona. Negara tropis yang berada tepat di garis khatulistiwa, salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang, negara dengan sebutan *Ring of Fire* yang membuat Indonesia memiliki banyak keunikan terutama wisata-wisata tropis nya seperti hutan hujan tropis, pantai dan gunung-gunung yang masih aktif dengan keindahan alam yang indah. Keindahan alam tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pariwisata yang banyak di kunjungi wisatawan baik lokal bahkan wisatawan internasional. Tempat-tempat wisata seperti Kepulauan Komodo dan Candi Borobudur menjadi daya tarik Indonesia karena merupakan salah satu Situs Warisan Dunia

yang di nobatkan oleh UNESCO. Danau Toba yang merupakan danau kaldera vulkanik terbesar di dunia yang menjadi daya tarik tersendiri wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia (Guild, 2018).

Indonesia mendukung program yang di tetapkan oleh UNWTO dan menindaklanjuti nya yaitu program ekoturisme dan pariwisata berkelanjutan untuk pembangunan dimana destinasi wisata alam harus dijaga kelestariannya, terutama dalam fungsi utamanya yaitu sebagai pemelihara keseimbangan alam karena, tujuan utama dari membangun pariwisata berkelanjutan adalah dengan menjaga kelestarian lingkungan (*Environmental Protection*); memberdayakan budaya (*Cultural Identity*); dan keuntungan ekonomi (*Economic Value*). Kerjasama tersebut memang akan menjadi sebuah konsep pariwisata yang menguntungkan dari berbagai sisi seperti ekonomi, lingkungan dan sosial karena sebagai salah satu industri penting dalam suatu negara pariwisata menjadi industri penyeimbang antara aspek sosial dan ekonomi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan berkomitmen untuk terus meningkatkan dan memajukan pariwisata berkelanjutan yang akan bekerjasama oleh UNWTO. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017).

Perkembangan pesat pariwisata di Indonesia dengan di tetapkannya tujuh lokasi di Indonesia oleh UNESCO sebagai Situs Warisan Dunia yaitu Pulau Komodo, Tangkuban Perahu, Pantai Pangandaran, Taman Laut Bunaken Candi Borobudur, Kuta Bali, Danau Toba dan Pantai Sengigi lantas masih belum mengubah status Indonesia yang masih sebagai negara berkembang dan masih terus berproses untuk melakukan pembangunan termasuk pembangunan ekonomi nasional termasuk dalam sektor pariwisata Indonesia memiliki berbagai kendala dalam proses perbaikan dan pembangunan pariwisata seperti kendala berupa keamanan seperti adanya terorisme atau perang etnis dan golongan, politik maupun ekonomi juga kendala berupa bencana alam sebagai negara yang rawan bencana (Angraini R. S., Kerjasama Indonesia dan UN WTO dalam mengembangkan Pariwisata Hijau melalui program STREAM, p. 17).

Salah satu bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh Indonesia dan UN World Tourism Organization dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan adalah proyek "*Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures in Pangandaran (STREAM)*". Kesepakatan kerjasama yang dilakukan Indonesia dan UN World Tourism Organization dilakukan untuk merevitalisasi destinasi kawasan pariwisata di Pangandaran,

kerjasama tersebut di presentasikan oleh Indonesia pada 6 Maret 2013 di International Tourism Bourse (ITB) Berlin, Jerman pada kesempatan tersebut membahas bagaimana proyek diadaptasi dan akan ditransfer ke tujuan wisata lainnya di Indonesia dan seluruh dunia (International Institute for Sustainable Development , 2013). Konferensi pengiriman STREAM berlangsung dari 5-7 Mei 2014 di Pangandaran, Indonesia, di dukung oleh Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan dan Konservasi Alam, dan Keselamatan Nuklir. Kerjasama tersebut merupakan peranan penting UN World Tourism Organization yang menjadi langkah-langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di daerah-daerah destinasi pariwisata di Indonesia dan di Asia Tenggara.

Kerjasama tersebut merupakan kerjasama Indonesia dan UN World Tourism Organization dibawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bertujuan sebagai model mitigasi perubahan iklim yang di rancang inovatif dan langkah-langkah adaptasi di tujuan wisata di Indonesia pada khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya. Kerjasama tersebut berfokus pada perubahan iklim yang telah mempengaruhi sektor pariwisata, proyek dilakukan dengan cara memerangi perubahan iklim dan memulihkan terumbu karang dan hutan bakau di sekitar pantai Pangandaran yang terletak di Jawa Barat. Dalam hal ini Pariwisata diharapkan agar lebih efektif dalam memerangi perubahan iklim global, melindungi sumber daya alam dan sambil mengarah kepada pengembangan kesejahteraan masyarakat melalui industri pariwisata dan lintas-sektor yang bermanfaat. Kerjasama ini merupakan contoh jelas bahwa sektor pariwisata tidak hanya mementingkan keuntungan secara ekonomi namun, juga terlibat dan bertanggung jawab untuk ikut berkontribusi dalam pengurangan efek rumah kaca dan adaptasi pengurangan iklim secara serius (UN World Tourism Organization, 2011).

Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures merupakan sebuah kolaborasi antara Indonesia dan UN World Tourism Organization yang memadukan pendekatan mitigasi dan adaptasi dari perubahan iklim demi terwujudnya pariwisata berkelanjutan. Program kerjasama ini telah berlangsung pada tahun 2011-2014, kerjasama tersebut merupakan kerjasama yang dirasa paling efisien untuk menerapkan program pariwisata berkelanjutan untuk pembangunan. Pangandaran merupakan daerah yang dipilih karena daerah ini memainkan peran penting dalam pembangunan daerah karena letaknya yang yang strategis (Suhartono, 2016).

Pantai Pangandaran adalah salah satu tujuan wisata yang terletak di Provinsi Jawa Barat, pantai Pangandaran memiliki dua sisi barat dan sisi timur. Tanggal 17 Juli 2006 terjadi gempa bumi di pantai selatan pulau Jawa. Gempa dengan kekuatan 6,8 SR tersebut menimbulkan Tsunami, bencana alam tersebut mengakibatkan beberapa kerusakan bangunan dan fasilitas juga menimbulkan korban jiwa pasca bencana tersebut pariwisata di Pangandaran menjadi redup dan meskipun pemerintah telah membuat kebijakan-kebijakan terkait pariwisata namun, kebijakan tersebut di rasa masih kurang cukup dan cenderung kurang efektif untuk tetap meningkatkan kunjungan wisatawan dan membangun kembali destinasi pariwisata di Pangandaran pasca Tsunami. Bencana Tsunami yang pada tahun 2006 menyebabkan pariwisata di Pangandaran merosot tajam merupakan latar belakang adanya kerjasama yang dilakukan Indonesia dan UNWTO dan melatarbelakangi proyek STREAM yang menjadi proyek utama di Indonesia, UNWTO dengan Indecon telah bekerjasama dalam merevitalisasi kawasan wisata di Pangandaran dan pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Kementerian Luar Negeri Indonesia setuju dengan kerjasama tersebut dan berlanjut hingga tahun 2013 untuk membangun pariwisata berkelanjutan di Pangandaran (Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety , n.d.).

Secara umum, tujuan kerjasama Indonesia dan UNWTO melalui proyek STREAM ini adalah menciptakan model inovasi dalam kegiatan mitigasi dan adaptasi untuk merespon perubahan iklim di Indonesia. Hasil dari proyek tersebut tidak hanya dilihat dari kontribusi masyarakat namun, juga dilihat dari respon masyarakat, terkait proyek STREAM dan keberlanjutan setelahnya. Kerjasama Indonesia dan UNWTO melalui proyek STREAM di nilai telah berhasil dengan indikator dari sarana prasarana yang telah di benahi dan peningkatan ekonomi dari sektor di pariwisata di Pangandaran, serta kontribusi masyarakat dalam kerjasama tersebut (Suhartono, 2016).

Keberhasilan proyek tersebut dapat di lihat melalui hasil-hasil nyata dari program kerjasama tersebut seperti banyaknya fasilitas-fasilitas penunjang industri pariwisata di Pangandaran yang telah dibangun, pelatihan-pelatihan mitigasi bencana dan perubahan iklim yang dilakukan kepada masyarakat lokal di dukung oleh pemerintah daerah dan adanya bantuan NGO (*Non-Governmental Organization*) baik dalam negeri maupun luar negeri sebagai *supporting system* selain *partner* utama UN World Tourism Organization, penerapan energi terbarukan di hotel-hotel dan restoran

di Pangandaran dan kenaikan angka pengunjung baik lokal maupun internasional (Angraini R. S., Kerjasama Indonesia dan UNWTO mengembangkan pariwisata hijau melalui program STREAM, pp. 32-33)

B. Rumusan Masalah

Faktor-faktor apa yang mendorong keberhasilan kerjasama Indonesia dan UN World Tourism Organization dalam penerapan *Sustainable Tourism for Development* melalui program *Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures in Pangandaran*?

C. Kerangka Pemikiran

1. Neo-Liberalisme

Neo-Liberalisme memiliki fokus terhadap sistem ekonomi yang baik dan ideal, yaitu mengedepankan kebebasan individu baik dalam menciptakan produksinya maupun memasarkan barang-barangnya. Unsur penting dalam Neo-Liberalisme adalah bagaimana seorang aktor berlaku di luar area aktor itu sendiri dengan meningkatkan fungsi terhadap struktur-struktur yang ada yang bisa di kembangkan lebih jauh lagi.

Secara fundamental, konsep Neo-Liberalisme memiliki banyak persepsi. Konsep Neo-Liberalism yang digunakan oleh penulis adalah bunyi dari beberapa konsep yang sesuai dengan topik yang sedang ditulis. Neo-Liberalisme merupakan definisi luas dari Liberalisme yang juga memiliki kesamaan tujuan dalam sistem internasional. Dalam hal ini, neo-liberalisme menyatakan bahwa aktor utama dalam hubungan internasional adalah negara sementara itu, neo-liberalisme juga menyatakan bahwa aktor non-negara juga memiliki peranan penting dalam hubungan internasional. Neo-liberalisme percaya bahwa dunia akan selalu memperluas setiap komponennya dan memiliki banyak isu yang di akan di hadapi di masa mendatang (Daddow, 2013, p. 133).

Tujuan dari konsep Neo-Liberalisme meliputi kestabilan politik, kesejahteraan ekonomi, pendidikan, ketahanan dan kelestarian lingkungan. Menurut David Baldwin (1993), salah satu poin terpenting dalam Neo-Liberalisme adalah menfokuskan terhadap kerjasama internasional. Sedangkan dalam kerjasama, menurut Arthur A. Stein (1982) yang menjadi perhatian dari Neo-

Liberalisme adalah keuntungan yang absolut dimana, para aktor yang terlibat dalam kerjasama internasional akan memperoleh keuntungan yang sama. Neo-liberalisme percaya bahwa aktor yang memiliki kesamaan kepentingan akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan melalui kerjasama. Neo-Liberalisme juga menekankan pada lingkungan domestik para aktor yang terlibat pada setiap lingkungan yang diambil oleh para aktor kerjasama internasional (Daddow, 2013).

Neo-Liberalisme berpendapat bahwa mereka setuju terhadap asumsi para Realis yang menyatakan bahwa aktor utama dalam politik dunia adalah negara. Namun, Neo-Liberalisme sedikit berbeda dengan pendapat kaum Realis pada beberapa hal yaitu negara adalah aktor penting dalam hubungan internasional dan kerjasama internasional dan aktor non-negara juga memiliki peran penting dalam hubungan internasional dan kerjasama internasional; institusi internasional dan organisasi internasional dapat membangun kerjasama dengan sebuah negara; hubungan transnasional, perusahaan transnasional merupakan dinamika yang penting dalam politik internasional menurut Keohane dan Nye (1971) (Whyte, 2012).

Neo-liberalisme merupakan *less state-centric* yang merupakan *vis-à-vis* dari teori Realis. Neo-Liberalisme juga memberikan peran kepada hubungan transnasional. Teori tersebut menetapkan sebagai pelengkap hubungan aktor transnasional *vis-à-vis* untuk terus meningkatkan kerjasama internasional. Meskipun, dalam hal ini tidak berekspektasi tinggi karena pergerakan dari aktivis transnasional dapat mengubah kebijakan tergantung pada kepentingan mereka dan kepentingan nasional masing-masing untuk yang telah di bentuk oleh sebuah negara (Daddow, 2013).

Dalam kerjasama antara Indonesia dan UNWTO dalam proyek STREAM, menurut Neo-Liberalisme, UNWTO sebagai aktor non-negara yang memiliki peranan penting dalam hubungan internasional dan kerjasama internasional. Peran aktor negara memiliki peranan penting namun, di era globalisasi dan perkembangan hubungan internasional aktor non-negara juga memiliki peranan penting dalam mengatur dan terlibat dalam kerjasama internasional. Di era globalisasi dunia memiliki banyak isu-isu non-tradisional yang harus di selesaikan tidak hanya dengan mengandalkan aktor negara, aktor non-negara juga memiliki peranan penting dalam mengatasi isu-isu hubungan internasional yang telah menjadi *world common issue* bersifat *borderless*. Dalam proyek STREAM juga terlihat bahwa setiap aktor memiliki sebuah tujuan dan kepentingan yang sama. UNWTO memiliki kepentingan untuk menerapkan program Pariwisata Berkelanjutan untuk

Pembangunan sedangkan Indonesia memiliki kepentingan untuk merevitalisasi destinasi pariwisata di Pangandaran pasca Tsunami juga untuk menciptakan model percontohan pariwisata berkelanjutan.

2. *The Role of International Organization*

Dalam Hubungan Internasional banyak perdebatan yang telah dilalui untuk menciptakan dan menjaga perdamaian dunia. Berbagai konsep dan teori untuk menciptakan perdamaian pun telah bermunculan seperti “*Balance of Power*” dan banyak teori dan konsep lain yang tujuannya yaitu bagaimana terciptanya perimbangan kekuatan dan pengelolaan dunia dengan baik agar terciptanya kekuatan yang mengarah kepada terpeliharanya dan tercapainya perdamaian. Perkembangan organisasi internasional cukup pesat, hal ini ditandai dengan keyakinan terhadap peranan organisasi internasional yang cukup penting dan sangat berpengaruh bagi terciptanya perdamaian dunia. Karena, hampir seluruh negara di dunia telah berpartisipasi bahkan lebih dari satu organisasi jadi, dapat dikatakan bahwa banyaknya peristiwa internasional terjadi, organisasi internasional hadir sebagai instrumen negara dan di pengaruhi serta di bentuk oleh negara. (Sugito, Organisasi Internasional: Aktor, Instrumen dalam Hubungan Internasional, 2016, pp. 1-2).

Sejak kemunculannya, organisasi internasional telah banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat internasional. Kontribusi dan jumlah organisasi internasional semakin pesat seiring dengan adanya fenomena globalisasi dan interdependensi. Adanya kemajuan teknologi seperti informasi, telekomunikasi, dan transportasi telah mengakibatkan semakin sering nya negara-negara di dunia saling berhubungan bahkan bekerjasama. Adanya kemajuan teknologi menyebabkan negara-negara menjadi *borderless* yang mengakibatkan adanya permasalahan lintas negara yang harus di selesaikan bersama-sama (Sugito, Organisasi Internasional: Aktor dan Instrumen dalam Hubungan Internasional , 2016, pp. 1-2).

Secara sederhana menurut Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr., 1976: 6 menyatakan bahwa organisasi internasional adalah: “ setiap lembaga yang telah di jadikan sebuah lembaga yang resmi antara negara-negara di dunia, biasanya di bentuk dengan perjanjian dasar, untuk melakukan beberapa fungsi yang saling bertualang yang dilaksanakan melalui pertemuan berskala dan kegiatan staf”

berdasarkan definisi tersebut organisasi internasional di bagi menjadi tiga unsur yaitu 1) Keterlibatan Negara dalam pola kerjasama 2) Pertemuan-pertemuan secara *continue* 3) Adanya *international civil servant* atau adanya staf yang bekerja sebagai pegawai internasional (Rudy, 2005, pp. 4-5). Di Era Globalisasi saat ini, organisasi internasional dapat di klasifikasikan menjadi dua klasifikasi yaitu *Inter-Governmental Organizations (IGO's)* dan *Non-Governmental Organizations (NGO's)* baik dalam lingkup internasional maupun domestik.

Dalam dinamika hubungan internasional memperlihatkan bahwa semakin kuatnya kemunculan aktor non-negara hubungan interdependensi setiap aktor akan semakin kompleks. Fungsi utama sebuah organisasi internasional adalah memberikan wadah bagi kerjasama antara negara-negara anggotanya. Organisasi tidak hanya memiliki fasilitas sebagai tempat sebuah keputusan untuk bekerjasama dapat dicapai. Fungsi lainnya adalah terdapat pada menyediakan saluran-saluran komunikasi yang komple diantara pemerintah bahkan dengan organisasi lain sehingga saling mengakomodasi kepentingan setiap masing-masing aktor. Dan dapat tereksplorasi sehingga memudahkan akses bagi pemecahan masalah yang muncul. Seperti PBB dan organisasi regional lainnya yang memiliki kapasitas dan kapabilitas jaringan untuk secara terus menerus memberikan akses bagi para anggotanya sehingga akomodasi dapat tercapai. Organisasi internasional memiliki peran operasional yaitu meliputi penggunaan sumber daya dan kemampuan organisasi, misalkan membentuk sebuah jaringan kerjasama, penggunaan teknis bantuan dan memberikan bantuan keuangan serta kekuatan militer (Sugito, Organisasi Internasional: Aktor dan Instrumen dalam Hubungan Internasional , 2016).

Manurut Teuku May Rudy yang mendefinisikan organisasi internasional bahwa organisasi internasional memiliki pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara yang di dasari pada struktur organisasi yang jelas serta di harapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga. Mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati dan diperlukan bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah, maupun sesama non-kelompok pemerintah kepada sebuah negara (Rudy, 2005).

Dalam hal ini aktor non-negara yaitu Organisasi Internasional memiliki kemampuan, kapabilitas dan kapasitas untuk melakukan tugas nya secara integratif. Kapabilitas dan kapasitas sebuah organisasi memiliki dua pendekatan yaitu Fungsional dan *Value Chain* atau rantai nilai. Kapabilitas juga menunjukkan bahwa kemampuan sebuah organisasi dalam menggunakan sumber

dayanya. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya yang berwujud (*tangible*) atau sumber daya yang berwujud (*intangible*). Kapabilitas suatu organisasi tersebut ada bila organisasi tersebut dapat mengintegrasikan sesuai tujuannya dan telah melaksanakan tugas-tugas tertentu. Kapabilitas organisasi menunjukkan pada sebuah kondisi dimana lingkungan internal yang terdiri dari faktor kekuatan dan kelemahan (Unila, n.d.).

D. Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat ditarik hipotesa: Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kerjasama Indonesia dan UN World Tourism Organization dalam penerapan *Sustainable Tourism for Development* melalui proyek *Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures in Pangandaran (STREAM)* adalah:

1. Peran penting UN World Tourism Organization sebagai aktor non-negara (organisasi internasional) dalam menerapkan programnya yaitu Pariwisata Berkelanjutan untuk Pembangunan dengan merevitalisasi pariwisata di Pangandaran pasca tsunami melalui proyek STREAM sebagai model percontohan Pariwisata berbasis lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
2. UN World Tourism Organization sebagai organisasi internasional memiliki kemampuan mengakomodasi kerjasama dan memberikan bantuan dengan berhasil menarik mitra kerjasama yang juga menjadi *key partner* dari kerjasama proyek “STREAM” yaitu *Non-Governmental Organization* dari Indonesia Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Indonesia Ecotourism Network (INDECON) dan *International Non-Governmental Organization* yaitu Adelphi, Germany.

E. Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan kerjasama antara Indonesia dan dan UN World Tourism Organization dalam merencanakan pembangunan pariwisata di Indonesia sesuai dengan konsep Pembangunan Berkelanjutan yang mengarah pada Pariwisata Berkelanjutan untuk Pembangunan.
2. Mengetahui pentingnya sektor pariwisata yang tidak hanya digunakan untuk kepentingan pembangunan perekonomian tetapi juga untuk menerapkan Pariwisata Berkelanjutan yang *concern* terhadap perlindungan alam dan perubahan iklim. Dan Indonesia sebagai negara dengan banyak nya jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang ke Indonesia.
3. Menjelaskan kerjasama Indonesia dan peran penting UN World Tourism Organization dalam membangun pariwisata Indonesia melalui bentuk kerjasama *Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures project in Pangandaran* dan faktor-faktor keberhasilan kerjasama tersebut.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian akan terbatas pada kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan UN World Tourism Organization melalui program *Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures in Pangandaran* pada tahun 2011-2014. Faktor-faktor dan bentuk kerjasama Indonesia dan UN World Tourism Organization untuk membangun pariwisata berkelanjutan untuk pembangunan melalui program tersebut dan keberhasilan dari program tersebut. Tahun 2011-2014 dipilih karena program STREAM merupakan program pembangunan pariwisata di Pangandaran pasca tsunami 2006, program revitalisasi tersebut sudah di rintis oleh pemerintah pasca tsunami namun, kurang efisien sebelum adanya bantuan dari UNWTO dan NGO lain yang berperan, dan tahun 2011 merupakan awal di selenggarakannya program STREAM untuk menerapkan *Sustainable Tourism for Development Program*. Dan 2014 merupakan akhir dari program setelah sebelumnya berhasil mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Pangandaran pasca tsunami.

G. Metode Penulisan

Metode yang akan di gunakan pada penulisan ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif dengan tujuan untuk menjelaskan variabel-variabel penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersumber dari informasi seperti buku, jurnal artikel, laporan berita, hasil konferensi, situs resmi PBB dan UN World Tourism Organizations juga website-website resmi pemerintah Indonesia di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dan juga beberapa jurnal dari institusi penelitian seperti JSTOR, *E-International Relations Students*, *emerald insights* dan beberapa lainnya untuk mendapatkan data-data dan informasi tentang kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan UN World Tourism Organization.

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat menyelesaikan penulisan dalam karya tulis harus di buat secara teratur dan sistematis, maka penulis secara keseluruhan akan membagi penulisan karya tulis ini dalam empat bab dan berikut sistematikanya:

Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran atau analisa teoritik, hipotesa, tujuan penelitian, metodologi penelitian serta kerangka penulisan.

Bab II Menjelaskan UN World Tourism Organization, peran dan programnya dalam menangani Pariwisata Internasional, penjabaran lebih detail tentang program *Sustainable Tourism for Development*, penjelasan lebih detail tentang langkah-langkah UN World Tourism Organization dalam mengembangkan program *Sustainable Tourism for Development*.

Bab III Menjelaskan dan mengenalkan secara detail tentang studi kasus *Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures in Pangandaran*. Apa itu program stream dan bagaimana cara kerjanya dalam menciptakan pariwisata berkelanjutan di Pangandaran

Bab IV Menjelaskan faktor-faktor apa yang mendorong keberhasilan kerjasama Indonesia dan UN World Tourism Organization dalam penerapan *Sustainable Tourism for Development* melalui program *Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures in Pangandaran*

Bab V yang merupakan bab terakhir yang sekaligus menutup penulisan karya tulis ini dengan pembahasan yang berupa rangkuman dari bab-bab sebelumnya yang disusun dalam sebuah kesimpulan karya tulis.